



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Kamis

Tanggal: 18 Maret 2021

Halaman: 1

Idul Fitri, Masyarakat Boleh Mudik Tingkatkan Skrining, Optimalkan Jaga Warga

YOGYA (KR) - Kebijakan Pemerintah Pusat yang memperbolehkan masyarakat untuk melakukan mudik pada Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah/2021 Masehi direpons positif oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Meski secara prinsip DIY siap untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat tersebut, namun perlu ada kebijakan yang lebih jelas terkait penegakan protokol kesehatan (prokes) 5M dalam upaya menekan lonjakan kasus Covid-19 yang berpotensi terjadi saat aktivitas mudik nanti.

"Saya belum tahu persis detailnya seperti apa, tapi siap melaksanakan keputusan itu. Seandainya dalam Idul Fitri mendatang masyarakat diperbolehkan melakukan mudik, yang jelas mobilitasnya akan meningkat. Nah sekarang dari peningkatan itu bagaimana kita bisa mengontrol agar tidak sampai terjadi penularan Covid-19. Untuk itu pemudik harus dipastikan bisa menerapkan prokes 5M dengan baik," kata Sultan HB X di Kepatihan, Yogyakarta, Rabu (17/3).

Sultan mengatakan, aturan yang perlu dipertimbangkan Pemerintah Pusat dalam upaya mengantisipasi peningkatan kasus Covid-19 selama mudik adalah pemeriksaan surat bebas Covid-19 terhadap pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi di wilayah perbatasan. Walaupun sebetulnya hal tersebut sudah pernah dilakukan saat perayaan Idul Fitri 2020 lalu.

Dimana pada saat itu Pemerintah Pusat melarang masyarakat untuk mudik.

Semua itu dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 dan dibutuhkan keterlibatan masyarakat secara langsung. Adapun bentuknya dengan menerapkan prokes secara ketat berupa 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi.

"Kalau ditanya apakah nantinya akan dilakukan penyekatan atau tidak, kami belum memperoleh informasi dari Pemerintah Pusat. Nanti kita lihat lagi detailnya seperti apa, apakah akan dimodifikasi atau tidak, kita tunggu kepastian dari pusat," ungkapnya.

Anggota DPD RI yang juga istri Gubernur DIY, GKR Hemas menyampaikan, peran gerakan keluarga dan Jaga Warga sebagai skrining perlu dioptimalkan terkait tidak adanya larangan mudik Idul Fitri dari Pemerintah pada tahun ini. Gerakan keluarga dan Jaga Warga ini sangat penting guna mengantisipasi kedatangan keluarga atau sanak saudara dari luar DIY saat Lebaran nanti.

"Jadi ini yang perlu kita antisipasi bagaimana peran keluarga dalam mengantisipasi keluarga yang akan datang dari luar daerah saat mudik Lebaran di tengah keluarganya masing-masing.

*** Bersambung hal 7 kol 1**

Tingkatkan

Peran Jaga Warga di DIY perlu dioptimalkan. Jadi jika ada keluarga dari luar daerah yang datang harus diminta surat keterangan sehat guna mengantisipasi penularan virus Corona di lingkungannya," terang Ketua TP PKK DIY tersebut.

Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji menyampaikan, Pemda DIY prinsipnya akan kembali memperkuat pelaksanaan protokol kesehatan yang telah dilaksanakan sejak PP-KM mikro dalam menghadapi arus mudik

Lebaran. Pihaknya akan kembali melakukan skrining pelaku perjalanan baik di pintu masuk DIY berupa bandara, stasiun maupun di jalan raya.

"Skrining pun akan dilakukan posko-posko yang ada di tingkat kalurahan maupun RT di masing-masing wilayah, sehingga kita masih sangat membatasi terhadap pergerakan orang terutama bagi yang belum bisa membuktikan dirinya sehat melalui *Rapid Test* Antigen atau Tes PCR," tegasnya. **(Ria/ra)-f**

Trihastono, S.Sos.
NIP. 19690723 199603 1

☐ Jump:

Yogyakarta,
Kepala

Ttd

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tata Pemerintahan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Kesehatan			
3. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 06 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005